

**PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH WARGA NEGARA INDONESIA EKS  
PENGUNSI TIMOR LESTE DI KELURAHAN FATUBENAO KECAMATAN KOTA  
ATAMBUA KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Carmelita R.C Tuhala

NPP. 31.0769

*Asal Pendaftaran Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Prodi Politik Indonesia Terapan*

E-mail: [reginatuhala0202@gmail.com](mailto:reginatuhala0202@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem (GAP):** *The problem of slum settlements in Belu Regency related to former Timor Leste refugees began with the refugee crisis in 1999. After living in refugee camps, their status was removed and treatment from the central government was stopped, making them Indonesian citizens who were the responsibility of the regional government. Belu Regency must now overcome the challenges of integrating around 70,000 former refugees, which have resulted in slum settlement conditions due to lack of access to basic services, decent housing and job opportunities. Objective:* *This research aims to find out how the slum organization of Indonesian citizens, former Timor Leste refugees, works. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Method:* *This research uses Wolman's opinion regarding the criteria for preserving a business with two dimensions, namely the efficiency dimension and the government management dimension. Results/Findings:* *Based on the results of research carried out in January 2024 in Belu Regency, the Belu Regency government has not been optimal in handling slum organizations of Indonesian citizens who are former Timor Leste refugees. The inhibiting factors in this handling itself are budget limitations, inadequate administrative capacity and slow government responsibility. Conclusion:* *The handling of slum organizations in the colors of Indonesia, former Timor Leste refugees, based on Wolman's opinion in Lambelanova regarding government preservation criteria, has not run optimally due to several factors such as budget, responsibility and administrative capacity, the efforts made by the Belu Regency regional government, namely proposing an integrated DAK proposal and collaborating with external parties.*

**Keywords:** *Refugees, Settlements, Slums, Management, Welfare*

**ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** *Permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Belu terkait eks pengungsi Timor Leste bermula dari krisis pengungsi tahun 1999. Setelah tinggal di kamp-kamp pengungsian, status mereka dihapus dan penanganan dari pemerintah pusat dihentikan, menjadikan mereka warga negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kabupaten Belu kini harus mengatasi tantangan integrasi sekitar 70.000 eks pengungsi, yang berujung pada kondisi permukiman kumuh akibat kurangnya akses layanan dasar, perumahan layak, dan peluang kerja. Tujuan :* *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana*

penanganan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendapat Wolman tentang kriteria peralihan urusan dengan dua dimensi yaitu dimensi efisiensi dan dimensi pengelolaan pemerintahan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024 di Kabupaten Belu, pemerintah Kabupaten Belu belum optimal dalam melakukan penanganan terhadap permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste. Faktor penghambat dari penanganan ini sendiri adalah keterbatasan anggaran, kapasitas administrasi yang belum memadai serta responsivitas pemerintah yang lambat. **Kesimpulan :** Penanganan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste berdasarkan pendapat Wolman dalam Lambelanova tentang kriteria peralihan urusan pemerintahan, belum berjalan secara optimal karena beberapa faktor seperti anggaran, responsivitas dan kapasitas administrasi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Belu yaitu mengajukan usulan DAK integrasi dan melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal.

**Kata Kunci : Pengungsi, Permukiman, Kumuh, Penanganan, Kesejahteraan**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh menjadi masalah yang dihadapi banyak kota di Indonesia. Provinsi NTT menempati posisi kedua dengan presentase 23,94% rumah tangga yang tinggal di rumah kumuh, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022. Salah satu penyebab besarnya presentase tersebut adalah kamp-kamp pengungsian warga eks pengungsi Timor Leste. Bermula dengan referendum 1999 di Timor Timur yang menyebabkan lebih dari 250.000 orang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur, terutama Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan tepi barat Timor Leste (Fachrudin, 2022).

Para pengungsi ini awalnya ditangani oleh pemerintah bersama UNHCR. Status para pengungsi Timor Leste dihapus pada tahun 2005 oleh UNHCR, dan penanganan para pengungsi Timor Leste ini beralih ke pemerintah pusat dengan dibantu oleh pemerintah daerah. Di tahun 2009, terbitlah surat Dirjen Bantuan Sosial yang menyatakan penanganan terhadap eks pengungsi Timor Leste telah selesai dan para eks pengungsi Timor Leste ini resmi menjadi warga negara Indonesia . Dengan adanya penghapusan status dan pernyataan selesai penanganan, maka para eks pengungsi Timor Leste yang belum tertangani dengan sendirinya menjadi urusan pemerintah daerah tempat para warga eks pengungsi Timor Leste ini tinggal. Peralihan urusan dalam mengurus warga eks pengungsi Timor Leste, membuat Kabupaten Belu terpaksa harus menerima dan mengurus lebih dari 70.000 jiwa warga eks pengungsi Timor Leste yang belum selesai tertangani di Kabupaten Belu, padahal kondisi ekonomi di Kabupaten Belu sendiri tergolong lemah.

Menurut Faquet, saat suatu tingkat pemerintahan menerima alih urusan tertentu, tingkat

tersebut seharusnya memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani urusan tersebut (Lambelanova et al., 2022). Namun, pada tahun 2009, ketika status pengungsi Timor Leste telah dihapus dan resmi menjadi WNI, Kabupaten Belu menghadapi kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Tingkat kemiskinan mencapai 27,13% dengan 74.369 jiwa penduduk miskin, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional saat itu sebesar 14,08%. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,29 %, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,67% karena berbagai faktor keterbatasan infrastruktur, akses permodalan, dan sumber daya manusia.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor utama di Kabupaten Belu, tetapi memiliki kontribusi rendah terhadap PDRB dan rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, yaitu 6,84%. Dengan kondisi sosial ekonomi yang rapuh ditambah dengan tanggung jawab mengurus lebih dari 70.000 jiwa eks pengungsi Timor Leste, menyebabkan banyak dari warga eks pengungsi Timor Leste di Kabupaten Belu belum memiliki tempat tinggal layak sebagai Warga Negara Indonesia. Sehingga, sampai sekarang masih banyak warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste yang masih belum terpenuhi haknya sebagai warga negara terutama dalam kebutuhan akan tempat tinggal yang layak (Maing & Jatmika, 2021).

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu bekas-bekas kamp pengungsi Timor Leste di Kabupaten Belu yang berlanjut menjadi permukiman warga eks pengungsi Timor Leste hingga sekarang adalah di Kelurahan Fatubena. Berdasarkan SK Bupati Belu nomor 205/HK/2020, ada dua kawasan permukiman kumuh dengan luas 25,45 Ha.

**Tabel 1.**

**Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Belu**

Lokasi	Luas (Ha)	Kelurahan	Kecamatan
Raimaten Fohomea	4,31	Manumutin	Kota Atambua
Fatubena	21,14	Fatubena	
Total	25,45		

Sumber : SK Bupati Belu Nomor 205/HK/2020

Berdasarkan SK Bupati Belu Nomor 205/HK/2020, ada dua lokasi permukiman kumuh di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu: Raimaten di Kelurahan Manumutin dan Fatubena di Kelurahan Fatubena. Fatubena memiliki luas permukiman kumuh terbesar mencapai 21,14 (Ha) dan sebagian besar dihuni oleh warga eks pengungsi Timor Leste (Maing & Jatmika, 2021).

Meskipun sudah 22 tahun lebih berada di Indonesia, dan resmi menjadi warga negara Indonesia, banyak warga eks pengungsi Timor Leste yang masih belum mendapatkan tempat

tinggal yang layak. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah permukiman kumuh ini belum teratasi di Kabupaten Belu.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah penelitian oleh Arifa Aini A. Djati dkk. (2023) berjudul “PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH, STUDI KASUS KELURAHAN OESAPA, KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG” menganalisis tingkat kekumuhan dan penanganan permukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah survei dengan wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan tingkat kekumuhan di Oesapa sedang, dengan pengaruh Program KOTAKU dalam pengelolaan sampah dan kondisi bangunan, meski belum signifikan. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk sosialisasi program (Djati et al., 2023). Penelitian oleh M.T Rapa dkk. (2021) berjudul “STRATEGI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MAMASA” menganalisis strategi pemerintah daerah dalam penataan permukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa strategi tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana (Rapa, n.d.). Penelitian oleh M. Soehadha (2019) berjudul “PENGUATAN IDENTITAS DAN SEGRAGASI SOSIAL KOMUNITAS EKS PENGUNGGI TIMOR TIMUR” mendeskripsikan kehidupan eks pengungsi Timor Timur di Belu dan interaksinya dengan penduduk lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemukiman kembali yang top down mengabaikan kebutuhan pengungsi, menyebabkan masalah sosial seperti akses tanah dan konflik, serta menguatkan identitas dan segregasi sosial (Soehadha, 2019). Penelitian oleh I. Fachrudin (2022) berjudul “PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA EKS TIMOR TIMUR UNTUK MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK” menganalisis hak-hak yang belum terpenuhi bagi warga eks Timor Timur, seperti tempat tinggal layak, pekerjaan, dan pendidikan. Hasilnya menunjukkan banyak warga masih tinggal di kamp pengungsian dengan infrastruktur yang buruk, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan anak-anak (Fachrudin, 2022). Penelitian oleh Rossy Lambelanova dkk (2022) “TRANSFER OF MANAGEMENT AUTHORITY FOR MARINE AFFAIRS FROM BANYUWANGI REGENCY GOVERNMENT TO EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT (STUDY OF EXISTING CONDITIONS IN 2019)” mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengelolaan paling banyak tanggung jawab bidang kelautan kepada pemerintah

provinsi, sedangkan kabupaten/kota hanya diperbolehkan membidangi perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadi alih Kelola kewenangan bidang kelautan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Pemprov Jatim belum menyelesaikan masalah perikanan dan permasalahan navigasi di Banyuwangi (Lambelanova et al., 2022) . Penelitian S.G Maing & S. Jatmika (2021) berjudul “DINAMIKA INTEGRASI LOKAL WARGA EKS TIMOR TIMUR DI WILAYAH PEMUKIMAN PENGUNGGI KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR” artikel ini meneliti dinamika integrasi lokal warga eks Timor Timur (Tintim) di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan adanya implementasi dari integrasi lokal warga eks Tintim yang tidak sesuai harapan. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam setiap tingkatan proses integrasi lokal, baik terkait legalitas, ekonomi dan sosial-budaya (Maing & Jatmika, 2021).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dari keseluruhan penelitian sebelumnya yang sudah penulis cantumkan, yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, penulis menganalisis penanganan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubeno Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur serta faktor-faktor penghambatnya sebagai dampak dari adanya peralihan urusan pemerintahan karena penghapusan status pengungsi Timor Leste oleh pemerintah pusat dengan menggunakan kriteria peralihan urusan pemerintahan menurut Faquet. Selain itu, ada perbedaan lokus penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini meliputi: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubeno Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat penanganan permukiman kumuh; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi apakah Kabupaten Belu memiliki kapasitas untuk menangani urusan warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubeno. Metode *purposive sampling* dan *snowball sampling* digunakan untuk menentukan informan. Sumber informan dalam

penelitian ini antara lain Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D, Pegawai Bidang Perumahan dan Permukiman PUPR, Lurah Kelurahan Fatubena, serta Ketua BKM Kelurahan Fatubena. Untuk masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti, terbagi atas masyarakat lokal dan masyarakat eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena, dengan jumlah yang mana akan menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan triangulasi data, dan dikaji menggunakan pendapat Wolman tentang kriteria peralihan urusan dengan dimensi efisiensi dan pengelolaan pemerintahan, yang terdiri atas sub dimensi skala ekonomi, eksternalitas, disparitas ekonomi dan kapasitas administrasi, variasi preferensi masyarakat serta stabilitas ekonomi makro, dan dimensi pengelolaan pemerintahan yang terdiri atas sub dimensi kepekaan, kemajemukan sosial budaya dan partisipasi politik (Lambelanova et al., 2022), yang bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan potensi Kabupaten Belu dalam menangani permukiman kumuh serta mengevaluasi kemampuan pemerintah setempat untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste terkait tempat tinggal yang layak.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penanganan Permukiman Kumuh Warga Eks Pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu**

##### **3.1.1 Dimensi Efisiensi (*efficiency value*)**

Berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dilapangan, penulis menggambarkan 5 sub dimensi dari dimensi efisiensi sebagai berikut.

###### **3.1.1.1 Skala Ekonomi**

Berdasarkan pendapat Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan ada beberapa jenis layanan atau urusan pemerintahan yang lebih efisien jika dikelola oleh pemerintah pusat atau tingkat pemerintah yang lebih tinggi, karena biaya per unit atau biaya rata-rata suatu layanan dapat lebih rendah jika diproduksi atau diselenggarakan dalam skala besar daripada dalam skala kecil. Dalam penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Simplisius V. Dalung ST, selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, memerlukan pengadaan infrastruktur dalam skala besar, karena titik kumuh yang ada di Kelurahan Fatubena tidak hanya ada satu titik kumuh, tetapi ada beberapa titik kumuh.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Laurensius Tahuk ST, selaku Pegawai Fungsional Teknik

Tata Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR, bahwa permukiman kumuh merupakan masalah kompleks, karena dari segi infrastruktur melibatkan banyak bidang mulai dari pasokan air bersih, sanitasi, listrik, akses jalan, kelayakan bangunan rumah, hingga pengelolaan sampahnya. Sehingga, untuk beberapa titik kumuh yang ada di Kelurahan Fatubena tentu memerlukan pengadaan dalam skala besar. Terkait mampu atau tidaknya Kabupaten Belu dalam pengadaan infrastruktur dalam skala besar tersebut, berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kabupaten Belu, Bapak Ronny Bara Lai ST, menyatakan bahwa Kabupaten Belu secara ekonomi masih belum mampu secara independen untuk membiayai pengadaan-pengadaan infrastruktur dan kebutuhan lainnya untuk menangani permukiman kumuh karena adanya keterbatasan dana (Lambelanova et al., 2022).

Dapat disimpulkan bahwa penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Belu tidak bisa dilaksanakan dengan mudah karena, Kabupaten Belu masih belum mampu untuk membiayai pengadaan infrastruktur dan kebutuhan lainnya yang memerlukan anggaran yang cukup besar untuk menangani permasalahan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Belu. Sebagaimana karakter proyek pembangunan infrastruktur *capital intensity dan longevity*, bahwa pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan modal, biaya yang tinggi, likuiditas yang rendah dan juga membutuhkan pembiayaan jangka panjang (Kanalung et al., 2018), sehingga Kabupaten Belu belum layak untuk menangani urusan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste berdasarkan kriteria skala ekonomi.

### **3.1.1.2 Eksternalitas**

Berdasarkan pendapat Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa eksternalitas dalam kebijakan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa keputusan atau kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang langsung terlibat, tetapi juga memperhitungkan dampaknya secara lebih luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak buruk dari adanya permukiman kumuh berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar permukiman kumuh, seperti kurangnya toilet, sanitasi yang buruk, hingga penumpukan sampah meningkatkan resiko penyakit menular ke masyarakat sekitar karena tidak memenuhi standar kebersihan. Akses jalan lingkungan yang sudah rusak, membuat rawan bagi para pengguna jalan, yang tidak hanya dirasakan oleh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste yang tinggal di permukiman kumuh, tetapi juga oleh warga sekitar.

Setelah adanya penanganan permukiman kumuh, terjadi peningkatan infrastruktur dan fasilitas, dengan pembangunan jalan lingkungan dan penanganan sampah pada beberapa titik kumuh, dengan begitu menciptakan kondisi yang lebih nyaman bukan hanya bagi warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste yang tinggal di permukiman kumuh tetapi juga bagi masyarakat sekitar, dengan begitu terjadi peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kirkpatrick bahwa dampak adalah pengaruh yang akan mendatangkan akibat positif maupun negatif (Kellie Praja Putra et al., 2021). Sehingga, urusan penanganan permukiman bagi warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubenao dari kriteria eksternalitas layak untuk ditangani pemerintah daerah karena memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat sekitar dengan adanya peningkatan infrastruktur.

### 3.1.1.3 Disparitas Ekonomi dan Kapasitas Administrasi

Berdasarkan pendapat Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa semakin besar variasi dalam potensi ekonomi dan kapasitas administrasi antar daerah, semakin pentingnya untuk berhati-hati dalam mendistribusikan urusan pemerintahan sehingga dalam mendistribusikan urusan pemerintahan, penting untuk mempertimbangkan apakah daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi dan kapasitas administrasi yang memadai untuk menangani urusan tersebut. Terkait kemampuan ekonomi Kabupaten Belu dalam menangani urusan permukiman kumuh, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, anggaran dari pemerintah Kabupaten Belu untuk menangani permukiman kumuh sendiri belum ada, dana dari APBD yang ada untuk pembangunan rumah yang terkena bencana alam, belum lagi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Belu mencapai lebih dari 30.000an penduduk miskin, yang semakin memberatkan perekonomian daerah untuk menangani masalah permukiman kumuh. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Pegawai Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Bapak Laurensius Tahuk ST, bantuan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Fatubenao pun merupakan hasil kolaborasi dari pemerintah daerah Kabupaten Belu, Program KOTAKU, AirNav dan PT. SMF, sebelum adanya kolaborasi ini, tidak ada penanganan terhadap permukiman warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubenao.

**Tabel 3.1**  
**Data Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belu**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin
2019	34,08	15,54
2020	34,18	15,37
2021	35,41	15,68
2022	33,98	14,84
2023	33,19	14,30

Sesuai dengan pendapat Arsyad (Christianingrum, 2021), bahwa keadaan sosial ekonomi yang berbeda tiap daerah akan membawa implikasi cakupan campur tangan pemerintah di tiap daerah berbeda pula. Keadaan sosial ekonomi Kabupaten Belu berdampak pada upaya pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam memberikan penanganan atau solusi yang berkelanjutan bagi para pengungsi yang tinggal dalam kondisi permukiman yang kumuh. Pemerintah daerah Kabupaten Belu dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Belu belum mampu untuk secara menyeluruh mencampuri berbagai aspek dari permasalahan permukiman kumuh tersebut. Sehingga, dari kriteria disparitas ekonomi, kondisi perekonomian di Kabupaten Belu belum mampu dalam menangani urusan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste ataupun keseluruhan. Terkait dengan kapasitas administrasi yang ada dalam pengelolaan permukiman kumuh, berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Bapak Ronny Bara Lay ST, hingga sekarang, di Kabupaten Belu belum memiliki struktur administratif yang memadai atau tim khusus yang secara resmi ditetapkan.

Pengelolaan administrasi penanganan tersebut hanya dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas PUPR Kabupaten Belu serta BP4D Kabupaten Belu. Kolaborasi ini terjadi secara informal tanpa adanya struktur formal seperti unit atau tim khusus yang secara eksplisit bertanggung jawab atas pengelolaan data dan administrasi program-program penanganan permukiman kumuh. Sehingga, kapasitas administrasi di Kabupaten Belu belum memadai dalam penanganan permukiman kumuh bagi warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste ataupun secara keseluruhan.

#### **3.1.1.4 Variasi Preferensi Masyarakat Terhadap Barang-Barang Kebutuhan Umum**

Berdasarkan pendapat Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa semakin heterogen preferensi masyarakat terhadap suatu layanan pemerintahan, semakin masuk akal untuk menyelenggarakan urusan tersebut oleh tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pegawai PUPR, Bapak Laurensius Tahuk ST, kebutuhan rata-rata dari setiap titik kumuh adalah rumah yang layak, tetapi kebutuhan yang mendesak di setiap titik kumuh bervariasi. Misalnya, sebelumnya, kebutuhan mendesak dari WNI eks pengungsi yang tinggal di permukiman kumuh di RT 029 RW 003 adalah pasokan air bersih

dan jalan lingkungan, sehingga dari dinas PUPR sendiri mengkoordinasikan agar pemberian bantuan diutamakan untuk pembuatan sumur bor, rehab sumur gali dan pembuatan jalan. Kemudian contoh lainnya di permukiman kumuh RT 020 RW 003, kebutuhan paling mendesak dari WNI eks pengungsi yang bermukim disana adalah jalan lingkungan, sehingga didahulukan bantuan pembangunan jalan rabat beton.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, terlihat bahwa setiap titik kumuh memiliki prioritas mendesak yang spesifik yang perlu ditangani untuk meningkatkan kualitas hidup warga di permukiman tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Belu telah melakukan upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di permukiman kumuh dengan fokus pada situasi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemerintahan menurut Osborne dan Gaebler (Fatikha, 2017), bahwa pemerintahan berorientasi pada masyarakat, dengan menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Meskipun telah ada upaya sebelumnya, kebutuhan warga terus berubah. Dengan pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif dalam menangani permukiman kumuh, serta merespons kebutuhan spesifik dari setiap titik kumuh.

Sehingga, urusan penanganan permukiman bagi warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena, dari kriteria variasi preferensi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan umum tepat untuk dialihkan menjadi urusan daerah.

### **3.1.1.5 Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi Makro**

Menurut Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang berdampak luas secara nasional, seperti pemeliharaan stabilitas ekonomi makro, sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat, hal ini penting untuk mencegah kebijakan ekonomi daerah yang tidak selaras yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam negeri dan dapat merugikan seluruh daerah jika tidak ada mekanisme kontrol dan koordinasi yang efektif.

Dalam penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena melibatkan pembangunan infrastruktur, koordinasi antar daerah dan kerjasama dengan pihak eksternal. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Simplisius V. Dalung, pembangunan berjalan lancar tanpa dampak negatif signifikan, yang justru juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lurah Fatubena, Stefanus Pires, menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun seperti jalan, berdampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan warga di permukiman kumuh, sehingga tidak memberi dampak negatif pada daerah atau wilayah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas PUPR terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam alokasi dana, dijelaskan bahwa anggaran disusun oleh

pemerintah daerah dan diusulkan ke pemerintah pusat, kemudian masuk dalam DAK integrasi. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D, Bapak Ronny Bara Lay, menegaskan bahwa penganggaran dilakukan sesuai peraturan dan dirincikan sesuai kondisi riil di lapangan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak merugikan wilayah lainnya. Kerjasama dengan pihak eksternal seperti Program KOTAKU dan PT. SMF juga berjalan dengan lancar. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D, Bapak Ronny Bara Lay, dan Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Fatubena, Bernadus Aquino Aku, kerjasama berjalan secara efektif dan sesuai prosedur sehingga membantu kelancaran penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Fatubena.

**Tabel 3.2**  
**Kerjasama Antar Pemda Belu Dengan Pihak Eksternal**  
**Dalam Penanganan Permukiman Kumuh**

Pihak Eksternal	Tahun	Uraian Kerjasama
Program Kotaku	2017-2019	Pemberian dana BDI-BPM pembangunan infrastruktur untuk penanganan permukiman kumuh
AirNav Indonesia	2021	Dana Bantuan Rp.46.225.000 untuk permukiman kumuh di Kelurahan Manumutin
PT. Sarana Multigriya Finansial	2021	Pembangunan 29 unit Rumah di permukiman kumuh Kelurahan Fatubena

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Belu (diolah oleh peneliti, 2024)

Penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena menunjukkan hasil positif melalui pembangunan infrastruktur, koordinasi antar daerah dan kerjasama dengan pihak eksternal. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanpa merugikan wilayah lain. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait alokasi dana berjalan lancar, sesuai prosedur undang-undang dan efektif memenuhi kebutuhan lokal. Kerjasama dengan program KOTAKU dan PT. SMF juga berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter & Van Horn bahwa hubungan baik antar organisasi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Wiratmoko & Lambelanova, 2021).

Sehingga, berdasarkan kriteria pemeliharaan stabilitas ekonomi makro, urusan penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena layak untuk menjadi urusan daerah, karena pemerintah daerah Kabupaten Belu mampu menangani permukiman kumuh secara efektif tanpa merugikan negara atau wilayah lain.

### 3.1.2 Dimensi Pengelolaan Pemerintahan

Berdasarkan pengumpulan data dan informasi di lapangan, penulis menggambarkan 3 dimensi dari aspek pengelolaan pemerintah sebagai berikut.

### **3.1.2.1 Kepekaan**

Menurut Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa semakin mendesak perlunya tanggapan dan pertanggungjawaban urusan pemerintahan kepada masyarakat setempat, semakin tepat urusan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam upaya menangani permukiman kumuh, terutama bagi warga eks pengungsi Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu berusaha merespons secara cepat kebutuhan warga. Penulis mewawancarai dua pejabat terkait untuk memahami langkah-langkah yang diambil. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kabupaten Belu, Ronny Bara Lay, menyatakan bahwa pemerintah memahami pentingnya hak atas tempat tinggal yang layak sebagai hak dasar yang harus dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belu meminta setiap kecamatan mempresentasikan kondisi kekumuhan, terutama di wilayah kantong permukiman eks pengungsi Timor Leste, untuk mengidentifikasi ketidaklayakan perumahan dan kebutuhan masyarakat yang hidup di permukiman Kumuh. Kemudian, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Bapak Simplisius V. Dalung ST, menjelaskan bahwa pemerintah mengadakan rapat koordinasi dengan para lurah, dimana mereka mempresentasikan kondisi permukiman kumuh di wilayah masing-masing termasuk masalah dan kebutuhan masyarakat.

Presentasi ini mencakup data, foto dokumentasi dan kondisi lapangan. Selain itu masyarakat dapat melaporkan rumah tidak layak huni secara online melalui aplikasi SIPENATA RTLH. Namun, pemerintah daerah belum bisa merespons secara cepat karena keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan cepat. Langkah-langkah pemerintah daerah Kabupaten Belu ini menunjukkan, pemerintah daerah Kabupaten Belu mampu mengidentifikasi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan, keluhan dan aspirasi masyarakat melalui perwakilan kelurahan dalam rapat koordinasi.

Meskipun terkendala dana, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk merespons sebaik mungkin dengan bekerja sama dengan pihak lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (Nurani et al., 2015), bahwa pemerintah yang bertanggungjawab harus responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena dilihat dari kriteria kepekaan, tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu.

### **3.1.2.2 Kemajemukan Sosial Budaya**

Berdasarkan pendapat Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa semakin suatu urusan pemerintahan memerlukan penyesuaian terhadap daerah, maka semakin layak

apabila urusan pemerintahan tersebut diserahkan kepada daerah. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Bapak Simplisius V. Dalung, ST, perlakuan yang diberikan terhadap warga eks pengungsi Timor Leste sama seperti warga lainnya di Kabupaten Belu. Pemerintah tidak membedakan mereka dalam program atau bantuan, meskipun stigma sebagai eks pengungsi masih ada. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PUPR, Bapak Laurensius Tahuk ST, menyatakan bahwa bantuan diberikan sama, tanpa membedakan latar belakang, karena warga eks pengungsi Timor Leste sudah menjadi warga resmi Kabupaten Belu.

Pendekatan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai budaya dan tradisi, termasuk bahasa dan komunikasi yang digunakan, untuk membangun kenyamanan dan kepercayaan dari warga eks pengungsi Timor Leste yang tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Fatubena. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Stefanus Pires S.IP, Lurah Kelurahan Fatubena, penanganan permukiman kumuh di Fatubena melalui program KOTAKU dan bantuan dari PT.SMF tidak membedakan latar belakang eks pengungsi Timor Leste. Program ini berfokus pada indikator kumuh yang ditetapkan dan memberikan bantuan berdasarkan penilaian objektif bukan berdasarkan latar belakang sosial budaya masyarakat di lokasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemerintah Kabupaten Belu memperlakukan semua warga secara sama dalam penanganan permukiman kumuh, tanpa membedakan latar belakang sosial budaya, mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun inklusi sosial dan mengurangi stigma terhadap warga eks pengungsi Timor Leste. Namun, dalam sosialisasi program, pemerintah daerah menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi sesuai budaya dan tradisi lokal untuk menciptakan komunikasi yang efektif, sehingga, menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan pendapat Fauzia bahwa keberhasilan program pemerintah harus menyentuh nilai-nilai budaya masyarakat untuk menjamin kerjasama dan keberhasilan program (Farina, 2021).

### **3.1.2.3 Partisipasi Politik**

Menurut Wolman (Lambelanova et al., 2022), menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang mendukung partisipasi aktif dari masyarakat dan mendukung perkembangan demokrasi dan pemahaman politik sebaiknya dikelola oleh daerah, karena partisipasi masyarakat yang langsung terlibat dalam pengembangan demokrasi memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam penanganan permukiman kumuh bagi warga eks pengungsi Timor Leste, penting

untuk melihat ada tidaknya partisipasi politik dari warga eks pengungsi Timor Leste dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan serta forum atau mekanisme partisipatif seperti apa yang disediakan oleh pemerintah bagi warga eks pengungsi Timor Leste untuk menyuarakan pendapat serta aspirasi dalam konteks penanganan permukiman kumuh. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Kelurahan Fatubena, Bapak Stefanus Pires, warga eks pengungsi Timor Leste mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hingga sekarang, sudah banyak warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena yang terlibat dalam struktur pemerintahan daerah, seperti menjadi RT, RW dan juga anggota LPM.

Selain partisipasi dalam pemerintahan, warga eks pengungsi Timor Leste juga diajak bergabung dalam berbagai kegiatan seperti kelompok tenun ikat, Jumat Bersih, kerja bakti dan kegiatan kemasyarakatan lainnya untuk membaaur dengan masyarakat dan menghilangkan stigma sebagai mantan pengungsi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Agida Soares, seorang warga eks pengungsi Timor Leste yang kini menjadi anggota LPM Kelurahan Fatubena, menyatakan bahwa pemerintah sangat terbuka dan memberi kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari wawancara dan data yang ada, terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Belu menerima dan memberi kesempatan bagi warga eks pengungsi Timor Leste untuk terlibat dalam pemerintahan dan berpartisipasi politik dengan diikutsertakan dalam struktur pemerintahan seperti menjabat sebagai RT, RW dan anggota LPM di Kelurahan Fatubena. Ini sesuai dengan pendapat Junanto bahwa partisipasi masyarakat adalah proses yang memberikan individu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan publik dan bagian dari proses keputusan demokratis (Santoso & Moenek, 2019).

Sehingga, urusan penanganan permukiman kumuh dari segi kriteria partisipasi politik tepat untuk dialihkan menjadi urusan daerah karena mendukung partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan demokrasi dan pemahaman politik.

### **3.2 Faktor penghambat penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi NTT**

#### **3.2.1 Keterbatasan dana**

Kabupaten Belu mengalami kendala keterbatasan dana dalam menangani permukiman kumuh, termasuk permukiman kumuh di Kelurahan Fatubena yang terdiri dari beberapa titik kumuh. Penanganan yang harus dilakukan tidak hanya mencakup perbaikan rumah, tetapi juga penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi dan sistem pengelolaan sampah yang efisien serta pembangunan atau perbaikan jaringan jalan dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kabupaten Belu, Bapak Ronny Bara Lay ST, beliau menyatakan bahwa masalah permukiman kumuh melibatkan banyak aspek sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang besar, terutama di Kelurahan Fatubena yang memiliki beberapa titik kumuh. Kabupaten Belu secara ekonomi belum mampu membiayai kebutuhan infrastruktur dan lainnya secara mandiri sehingga, banyak titik kumuh di Kelurahan Fatubena pun belum ditangani secara intensif. Dengan demikian, penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena memerlukan pengadaan infrastruktur dalam skala besar, namun terhambat oleh keterbatasan dana.

### **3.2.2 Disparitas ekonomi dan kapasitas administrasi**

Kabupaten Belu menghadapi kesulitan ekonomi dalam menangani permukiman kumuh, baik untuk warga lokal maupun warga eks pengungsi Timor Leste. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas PUPR, Simplisius V. Dalung ST, anggaran dari pemerintah daerah belum tersedia untuk penanganan permukiman kumuh, terutama karena sebelumnya ada pandemi Covid -19. Dana yang dialokasikan hanyalah untuk rumah terkena bencana alam, sementara ribuan di Kabupaten Belu masih tidak layak huni. Jumlah penduduk miskin yang tinggi, mencapai lebih dari 30.000 orang, semakin membebani perekonomian daerah. Bapak Laurensius Tahuk ST, selaku pegawai Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PUPR Kabupaten Belu, menambahkan bahwa kesenjangan pendapatan dan mahalanya harga bahan bangunan membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memperbaiki rumah mereka.

Dari segi administrasi, pengelolaan administrasi yang dilakukan hanya melalui kolaborasi informal antara BP4D dan Dinas PUPR, tanpa adanya unit atau tim khusus yang bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kabupaten Belu, meskipun ada kelompok kerja perumahan, tetapi tugas mereka tidak spesifik pada penanganan permukiman kumuh. Kemampuan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Belu yang tidak mampu untuk menangani permukiman kumuh, ditambah dana perimbangan dari APBN yang tidak mencukupi untuk pembiayaan kewenangan pemerintah daerah, angka kemiskinan yang semakin tinggi menghambat pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk menangani permukiman kumuh. Selain itu, dari segi administrasi, penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Belu belum memiliki struktur atau tim khusus yang resmi mengelola administrasi penanganan permukiman kumuh. Kurangnya kapasitas administrasi ini menjadi hambatan dalam mengelola dan mengoordinasikan program penanganan permukiman kumuh secara efektif.

### 3.2.3 Kepekaan

Salah satu faktor penghambat penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kabupaten Belu adalah lambatnya respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PUPR, menyatakan bahwa Kabupaten Belu belum mampu memberikan respons atau pertanggungjawaban cepat kepada masyarakat karena keterbatasan anggaran. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Bapak Simplisius V. Dalung ST, juga menegaskan bahwa anggaran terbatas dan masalah sosial ekonomi lainnya membuat penanganan permukiman kumuh semakin terhambat. Keterbatasan dana yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Belu menjadi penghalang utama dalam merespons cepat atau memenuhi kebutuhan terkait penanganan permukiman kumuh. Sehingga, meskipun pemerintah daerah memahami kondisi riil lapangan, tanpa dukungan dana yang memadai, implementasi program penanganan permukiman kumuh secara optimal menjadi sulit.

### 3.3 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Kelayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Dalam Menangani Urusan Permukiman Kumuh Warga Negara Indonesia Eks Pengungsi Timor Leste

Pemerintah daerah Kabupaten Belu menghadapi hambatan serius dalam penanganan permukiman kumuh akibat keterbatasan anggaran dan kapasitas administrasi yang belum memadai, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Untuk mendapat alokasi dana alokasi khusus (DAK) integrasi, pemerintah daerah Kabupaten Belu telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh DAK integrasi.
2. Melakukan advokasi dan lobi ke pemerintah pusat untuk terus memperoleh dana hibah dan bantuan tambahan, dengan terus memperbarui dan menyempurnakan dokumen perencanaan seperti RP3KP agar penanganan permukiman kumuh bisa berkelanjutan.

Dengan adanya dokumen perencanaan yang baik seperti RP3KP, pemerintah memiliki roadmap yang jelas untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman, mencegah munculnya masalah baru dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Upaya ini sejalan dengan konsep advokasi yang bertujuan untuk memajukan dan menciptakan kebijakan yang mendukung perumahan yang layak bagi masyarakat.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Permasalahan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu yang masih menjadi permasalahan hingga kini, berdasarkan kriteria peralihan urusan pemerintahan menurut Wolman, penulis menemukan bahwa penanganan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste masih terhambat salah satunya adalah karena kekurangan anggaran. Sama halnya dengan temuan Djati, dimana tingkat kekumuhan sedang yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan Oesapa adalah karena pengelolaan sampah dan kondisi bangunan dengan kualitas yang buruk, sehingga penanganannya memerlukan biaya yang besar, yang menjadi salah satu kendala dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Oesapa (Djati et al., 2023).

Permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Belu terkait eks pengungsi Timor Leste bermula dari krisis pengungsi tahun 1999. Setelah tinggal di kamp-kamp pengungsian, status mereka dihapus dan penanganan dari pemerintah pusat dihentikan, menjadikan mereka warga negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kabupaten Belu kini harus mengatasi tantangan integrasi sekitar 70.000 eks pengungsi, yang berujung pada kondisi permukiman kumuh akibat kurangnya akses layanan dasar, perumahan layak, dan peluang kerja. Berdasarkan kriteria peralihan urusan pemerintahan menurut Wolman, dalam hal peralihan urusan pemerintahan, tingkat tersebut seharusnya memiliki sumber daya memadai dalam menangani urusan tersebut (Lambelanova, 2022), penulis menemukan bahwa dari segi sumber daya baik dari anggaran kapasitas administrasi dalam mengelola penanganan serta respon dari pemerintah sendiri masih belum memadai sehingga, belum mampu menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Hal ini sejalan dengan temuan Lambelanova, yang mengungkapkan bahwa terjadi alih Kelola kewenangan bidang kelautan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Pemprov Jatim belum menyelesaikan masalah perikanan dan permasalahan navigasi di Banyuwangi karena sumber daya yang belum memadai (Lambelanova, 2022).

## **IV. KESIMPULAN**

Penanganan permukiman kumuh warga negara Indonesia eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena Kecamatan Kota Atambua yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu, yang dikarenakan adanya peralihan urusan terhadap warga eks pengungsi Timor Leste dari pemerintah pusat, telah dilaksanakan penanganannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu, namun terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana dengan optimal yaitu:

1. Skala ekonomi, dikarenakan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan penanganan permukiman kumuh belum terpenuhi
2. Disparitas ekonomi dan kapasitas administrasi, dikarenakan persoalan keterbatasan sumber daya finansial daerah dan pengelolaan administrasi yang belum memadai.
3. kepekaan, dimana lambatnya respons pemerintah terhadap kebutuhan warga di permukiman kumuh.

Faktor penghambat penanganan permukiman kumuh warga eks pengungsi Timor Leste di Kelurahan Fatubena mencakup keterbatasan anggaran yang menghambat pengadaan infrastruktur, serta masalah sosial seperti tingginya jumlah penduduk miskin yang menyebabkan kesenjangan pendapatan. Selain itu, tidak adanya struktur formal dalam pengelolaan administrasi penanganan dan lambatnya respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga eks pengungsi Timor Leste dalam konteks penanganan permukiman kumuh turut menjadi kendala utama. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan anggaran yaitu dengan mengajukan dana alokasi khusus integrasi untuk mendapatkan anggaran penanganan terhadap permukiman kumuh serta mengajukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk mendapat dana hibah ataupun bantuan tambahan.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Christianingrum, R. (2021). Disparitas Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(2), 102–120. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.111>
- Djati, A. A. A., Wulakada, H. H., & Rahmawati, A. (2023). Penanganan Pemukiman Kumuh, Studi Kasus Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. *Jurnal Geografi*, 19(1), 10–24. <https://doi.org/10.35508/jgeo.v19i1.11680>
- Fachrudin, I. (2022). Pemenuhan Hak Warga Negara Eks Timor Timur untuk Mendapatkan Kehidupan yang Layak. *Jurnal HAM*, 13(3), 401. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.401->

- Farina. (2021). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara*, 10(1), 323–338.
- Fatikha, A. C. (2017). Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(1), 90–97.
- Kanalung, J., Lumeno, S., & Mandagi, R. J. M. (2018). Evaluasi Penyelesaian Proyek Infrastruktur Jalan Antara Anggaran Apbd Dan Apbdp Pada Dinas Pu Dan Penataan Ruang Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Sipil Statik*, 6(8), 569–578.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jss/article/view/20256>
- Kellie Praja Putra, H. Khasan Effendy, & Rossy Lambelanova. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purnabakti Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 827–842. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.343>
- Lambelanova, R., Prabowo, H., Sinaga, O., & Toyib, A. (2022). Transfer of Management Authority for Marine Affairs from Banyuwangi Regency Government to East Java Provincial Government (Study of Existing Conditions in 2019). *Croatian International Relations Review*, 28(90), 77–100. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0081>
- Maing, S. G., & Jatmika, S. (2021). Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Indonesian Perspective*, 6(1), 38–64. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37512>
- Nurani, A. S., Zauhar, S., & Saleh, C. (2015). Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(04), 213–220. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.1>
- Rapa, M. . (n.d.). *1897-3769-2-Pb*.
- Santoso, E. B., & Moenek, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 97.  
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.292>
- Soehadha, M. (2019). Penguatan Identitas dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur. *Sosiologi Reflektif UIN Kalijaga*, 13(2), 351–378.  
<https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1563>
- Wiratmoko, E., & Lambelanova, R. (2021). Implementation of E-Government on Village Administration and Information System in Sayang Village Jatinangor District Sumedang

Regerency West Java Province. *International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)*, 31–37.